MODUL
TEMA 12

Dinamisnya Kehidupan Bangsaku

LIVEWORKSHEETS

INTERACTIVE WORKSHEETS BY BAPAJO

MATERI MODUL 12 PAKET C SEJARAH INDONESIA

POLITIK EKONOMI NEGARA BE LIA

A. Dinamika Politik Negara Muda

1. Peran PPKI di Awal Kemerdekaan

Ketika Republik Indonesia menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, negara belum memiliki lembaga tertinggi dan tinggi negara seperi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ataupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Berdasar-kan UUD 1945, sistem pemerintahan yang dikehendaki adalah presidensial, namun dua bulan setelah penetapan UUD 1945 sistem pemerintahan berubah menjadi parlementer. Maka setelah proklamasi dikumandangkan, esok harinya yaitu 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang untuk pertama kalinya yang menjadi kelanjutan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
pada 10 – 16 Juli 1945 yang membahas rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hasil sidang ini adalah:

a. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
b. Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
c. Membentuk sebuah Komite Nasional untuk membantu Presiden selama MPR dan DPR belum terbentuk.

Pada Minggu, 19 Agustus 1945, PPKI melanjutkan sidangnya yang dipimpin oleh Otto Iskandardinata, menghasilkan dua keputusan, yaitu:

a. Pembagian wilayah yang terdiri atas 8 (delapan) provinsi beserta calon gubernurnya.
b. Pembentukan Komite Nasional Daerah.

Rapat PPKI dilanjutkan pada 22 Agustus 1945 yang berlokasi di Gedung Kebaktian Rakyat Jawa. Pada rapat yang yang dipimpin oleh Wakil Presiden Republik Indonesia ini menghasilkan keputusan sebagai berikut:

a. Komite Nasional Indonesia (KNI) adalah badan yang berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat sebelum pemilihan umum diselenggarakan dan disusun dari tingkat pusat hingga daerah.
b. Partai Nasional Indonesia (PNI) dirancang sebagai partai tunggal RI.
c. Badan Keamanan Rakyat (BKR) berfungsi sebagai penjaga keamanan umum bagi masing-masing daerah.

Pada 23 Agustus 1945 Presiden Soekarno mengumumkan hasil sidang PPKI tersebut, tetapi keputusan yang menyangkut ketetapan kedua, yaitu PNI sebagai satu-satunya partai politik, tidak jadi diberlakukan.
Setelah membentuk KNI pada 18 Agustus 1945, PPKI kembali membentuk KNIP pada 22 Agustus 1945 yang berpusat di Jakarta. Badan yang diketuai oleh Mr.Kasman Singodimedjo ini diumumkan pada 25 Agustus 1945 dan dilantik pada 29 Agustus 1945.
Pada tingkat daerah dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) yang berada di seluruh provinsi di Indonesia dan badan ini berkembang sebagai badan legislatif.

Pada tanggal 16 Oktober 1945 KNI menyelenggarakan sidangnya yang pertama. Hasil sidang tersebut adalah:

a. Membentuk Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) yang beranggota 15 orang.
b. Mengusulkan kepada Presiden supaya KNI diberi kekuasaan Legislatif selama MPR/DPR belum terbentuk.

Usulan Komite Nasional tersebut mendapat sambutan dari pemerintah yang segera mengeluarkan maklumat wakil presiden No. X, yang isinya sesuai dengan usulan KNIP. Setelah BPKNIP terbentuk, kegiatan pertama yang dilakukannya adalah mengajukan usulan kepada pemerintah untuk segera membentuk partai-partai politik. Usul tersebut dilakukan melalui pengumuman BPKNIP Nomor 3 tanggal 30 Oktober 1945, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

a. BPKNIP menganggap roda pemerintahan telah berputar maka telah tiba saatnya untuk mengusahakan pengertian rakyat.
b. BPKNIP menolak pembentukan partai politik tunggal.

BAPA JO CHANNEL YOUTUBE

LIVEWORKSHEETS

Usulan BPKNIP diterima oleh pemerintah yang kemudian mengeluarkan Maklumat Pemerintah 3 November 1945 yang isinya adalah:

a. Pemerintah menghendaki adanya partai-partai politik, karena akan membuka jalan bagi semua aliran atau paham yang ada dalam masyarakat.
b. Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun sebelum dilaksanakan pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat pada Januari 1946.

Setelah Maklumat Pemerintah disampaikan, lahirlah partai-partai politik baru antara lain; Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Buruh Indonesia (PBI) Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Katolik, Partai Kristen dan Partai Sosialis.

2. Pembagian Wilayah Republik Indonesia

Hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945, tentang pembentukan kabinet dan pembagian wilayah Indonesia, direalisasikan pada 2 September 1945. Panitia kecil yang terdiri dari Mr. Ahmad Subardjo, Sutardjo Kartohadikusumo, dan Mr. Kasman Singodimedjo, membentuk departemen dan membagi wilayah Indonesia atas 8provinsi serta gubernurnya. Pembentukan kabinet terdiri dari 12 kementerian. Kabinet tersebut merupakan kabinet presidensil yang bertanggung jawab kepada presiden dan anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Tugas kabinet adalah membantupresiden menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan amanat UUD 1945.

3. Kabinet Pertama Republik Indonesia

Sistem pemerintahan awal kemerdekaan adalah sistem presidensiil, yaitu cabinet dibentuk dan bertanggungjawab kepada presiden. Kedudukan presiden selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Presiden Soekarno Ketika itu membentuk kabinet dalam rangka memenuhi kelengkapan alat negara. Namun kondisi pada saat itu keadaan dan situasi sungguh sulit serta tidak memungkinkan membentuk kabinet secara leluasa. Keadaan Indonesia di awal kemerdekaan masih carut marut. Kondisi ekonomi belum menentu. Ditambah lagi tokoh tokoh

Dalam perjalanannya, sistem Presidensiil berubah menjadi sistem Parlementer, dimana presiden bertanggungjawab kepada parlemen. Pada saat itu sebagai parlemen adalahKNIP. Sistem Parlementer ditandai dengan terbentuknya kabinet dibawah pimpinan Perdana Menteri Sutan Syahrir, dilanjutkan Amir Syarifuddin, dan Mohammad Hatta.

No	Kementerian	Nama Menteri
1	MenteriLuar Negeri	Mr. Achmad Subardjo
2	Menteri Dalam Negeri	R.A.A Wiranatakoesoema
3	Menteri Keamanan Rakyat	Soeprijadi(gugur), digantikan Soeljadikoesoemo
4	Menteri Kehakiman	Prof. Dr. Soepomo
5	Menteri Penerangan	Amir Sjarifudin
6	Menteri Keuangan	Dr. Samsi Sastrawidagda
7	Menteri Kemakmuran	Ir. Soerachman Tjokroadisoeryo
8	Menteri Perhubungan	Abikoesno Tjokrosoejoso
9	Menteri Pekerjaan Umum	Abikoesno Tjokrosoejoso
10	Menteri Sosial	Iwa Koesoemasoemantri
11	Menteri Pengajaran	Ki Hajar Dewantara
12	Menteri Kesehatan	Dr. Boentaran Martoatmodjo
13	Menteri Negara	Mohammad Amir, Wahid Hasjim, Mr.Sartono, A.A.Maramis, Otto Iskandarninata (5 orang)

4. Pembentukan Badan-Badan Perjuangan

Sebagai realisasi Keputusan PPKI tanggal 22 Agustus 1945, Presiden menganjurkan para pemuda yang dahulunya pernah tergabung dalam anggota Heiho, Peta, Seinendan,

Keibodan, dan KNIL untuk segera bergabung dan membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) baik ditingkat pusat maupun daerah. Pembentukan BKR ternyata tidak semudahsendiri yang lepas dari BKR antara lain adalah Barisan Rakyat Indonesia (BARA), Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Banteng (BB),

LIVEWORKSHEETS

Hizbullah, Sabilillah, Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), Pemuda Indonesia Maluku (PIM), Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI), dan Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo).

5. Politik Multi Partai

Hasil keputusan BPKNIP menolak pembentukan partai politik tunggal di Republik Indonesia. Usulan BPKNIP kepada pemerintah adalah membentuk partai-partai politik. Usulan tersebut diterima oleh pemerintah dengan dikeluarkannya maklumat tentang pendirian partai-partai politik. Tujuannya adalah untuk mewadahi semua aliran atau paham yang ada di masyarakat dan ikut serta dalam pemilihan umum.

6. Ideologi dan Partai Politik Pada Awal Kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan hanya ada satu partai politik yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI). Tetapi berdasarkan Maklumat Pemerintah Nomor 3 tanggal 3 November 1945tentang anjuran pembentukan partai-partai politik dari berbagai faham dan aliran yang ada dalam masyarakat, maka bermunculan partai-partai politik dengan basis ideologinya masing-masing.

Sejak akhir tahun 1945 itulah Indonesia menganut sistem multipartai. Partai-partai yang terdaftar saat itu antara lain sebagai berikut.

No	Partai	No	Partai
1	Partai Nasional Indonesia (PNI)	6	Partai Sosialis Indonesia (Parsi/PSI)
2	Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)	7	Persatuan Rakyat Marhaen(Permai)
3	Partai Komunis Indonesia (PKI)	8	Partai Rakyat Sosialis (Paras)
4	Partai Buruh Indonesia (PBI)	9	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
5	Partai Rakyat Jelata (PRJ/Murba)	10	Partai Katholik Republik Indonesia (PKRI)

Partai-partai tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan ideologinya, yaitu:

a. Ideologi Bersifat Nasionalisme

Partai yang mendasarkan ideologinya bersifat nasionalis adalah Partai Nasional Indonesia (PNI). Dasar perjuangan partai nasionalis adalah faktor kemanusiaan, yang mengutamakan tercapainya kesatuan bangsa. Tujuan dari partai beridelogi nasionalis adalah mengutamakan terwujudnya kebebasan nasional. Menurut penganut nasionalis ini, kebebasan nasional merupakan pintu gerbang menuju kemakmuran suatu bangsa. Aliran ini menganggap penting untuk melakukan hubungan dengan luar negeri untuk mendapatkan dukungan dunia internasional.

Tugas pemerintah adalah membentuk suatu komunitas bangsa yang bebas dari dominasi dan tekanan bangsa asing baik dalam politik, ekonomi, maupun budaya.

b. Ideologi Bersifat Agama

Dasar dari partai yang ideologinya bersifat agama adalah perjuangan yang dilakukan mengutamakan penyebaran dan penerapan kaidah-kaidah atau hukum-hukum yang berlaku pada agama bersangkutan. Partai yang berideologi keagamaan pada saat itu diantaranya:

1) Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Partai Nahdlatul Ulama yang beraliran Islam;
2) Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI) yang beraliran agama Katolik;
3) Partai Kristen Indonesia (Parkindo) yang beraliran agama Kristen.

c. Ideologi Bersifat Sosialis-Komunis

Dasar perjuangan partai yang berideologi sosialis-komunis adalah internasionalisme atas kemanusiaan. Mereka menjunjung tinggi doktrin komunisme. Partai berideologi komunisme terbesar di Indonesia adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Sementara itu yang beraliran sosialis adalah Partai Sosialis Indonesia

(Parsi/PSI) dan Partai Rakyat Sosialis (Paras). Sejak awal kemerdekaan partai ini berkembang dengan pesat, terbukti pada saat Pemilu 1955 termasuk dalam 4 besar partai yang meraih suara terbanyak.
Kemunculan banyak partai tersebut dapat terasa langsung bagi KNIP. Perwakilan partai tersebut duduk dalam badan pekerja KNIP. Melalui sstem multi partai ini menunjukkan bahwa antusiasme dan kesadaran berpolitik rakyat Indonesia saat itu sangat baik sehingga mereka menunjukkan keragaman ideologi yang ada. Keragaman ideologi tercermin dalam hasil Pemilu pertama tahun 1955, dimana 4 partai politik memenangkan suara terbanyak yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI.

7. Politik di Masa Demokrasi Liberal

Sistem politik pada masa demokrasi liberal telah mendorong lahirnya partai-partai politik, karena dalam sistem kepartaian menganut sistem multi partai. Pada masa demokrasi liberal ini, partai politik menjamur. Tercatat jumlah partai yang ikut pemilu 1955 ada sebanyak 172 partai politik.
Konsekuensi dari pelaksanaan sistem politik demokrasi liberal parlementer gaya barat dengan sistem multi partai, maka partai-partai inilah yang menjalankan pemerintahan melalui perimbangan kekuasaan dalam parlemen. Demokrasi Liberal sering disebut Demokrasi Parlementer, kabinet bertanggung jawab pada parlemen. Sehingga jatuh bangun kabinet tergantung dari parlemen. Akibatnya, kabinet sering berganti. Usia kabinet yang pendek menyebabkan program kabinet tidak bisa berjalan optimal.
Pada kurun waktu tahun 1950 – 1959, PNI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat dalam DPR. PNI dan Masyumi silih berganti memegang kekuasaan dalam empat kabinet. Adapun susunan kabinet yang menjalankan roda pemerintahan pada masa demokrasi liberal, adalah seperti pada tabel berikut:

No	Nama Kabinet	Masa Kepemimpinan
1	Kabinet Natsir	6 September 1950–21Maret 1951
2	Kabinet Soekiman	27 April 1951–3April 1952
3	Kabinet Wilopo	3 April 1952–3Juni 1953
4	Kabinet Ali II	31 Juli 1954–24Juli 1955
5	Kabinet Burhanuddin Harahap	12Agustus 1955–3Maret 1956
6	Kabinet Ali Sastramojoyo II	20 Maret 1956 – 4 Maret 1957
7	Kabinet Djuanda	9 April 1957 – 5 Juli 1959

8. Politik di Masa Demokrasi Terpimpin

Masa demokrasi terpimpin di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dan diakhiri dengan keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tanggal 11 Maret 1966. Dikeluarkannya Dekrit Presiden karena adanya kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan Undang-undang.
Adapun isi dari Dekrit Presiden adalah pembubaran Badan Konstituante, UUD 1945 kembali digunakan sebagai undang-undang dasar negara, dan pembentukan MPRS (MPR sementara) yang terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditambah utusan golongan dan daerah, dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) .
Tindak lanjut dari Dekrit Presiden, pada tanggal 10 Juli 1959 pemerintah membentuk sebuah kabinet yang disebut Kabinet Karya.
Kabinet Karya dipimpin langsung oleh Presiden. Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kabinet parlementer berganti dengan sistem kabinet presidensial, sedangkan sistem demokrasi liberal diganti dengan sistem demokrasi terpimpin.

Kebijakan politik yang diambil pada masa demokrasi terpimpin, antara lain sebagai berikut:

a. Pembentukan DPR

Berdasarkan Penetapan Presiden No.1 Tahun 1959 uang dikeluarkan pada tanggal 15 juli 1959 menyatakan bahwa sebelum terbentuk DPR menurut UUD 1945, maka DPR hasil pemilu tahun 1955 atas dasar UU No. 7 Tahun 1953 tetap menjalankan tugasnya.

b. Pembentukan MPRS

LIVEWORKSHEETS

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UUD 1945, lembaga tertingginegara harus dibentuk adalah MPR. Namun, berhubung belum melaksanakan Pemilu maka MPRS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. Ketua MPRES adalah Chaerul Saleh.

c. Pembentukan DPAS.
Berdasarkan Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959 dibentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

d. Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappernas) Pada bulan Agustus 1959, dibentuk Dewan Perencanaan Nasional yang diketuai oleh Muh. Yamin. Pada tahun 1963, Depernas (Dewan Perencanaan Nasional) diganti menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappernas) yang dipimpin langsung oleh presiden sendiri.

e. Pembentukan Front Nasional
Pada tanggal 31 Desembar Tahun 1959, dibentuk Front Nasional yang berfungsi sebagai lembaga negara yang melaksanakan pembangunan semesta Indonesia.

f. Pembentukan DPR-GR
Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 karena DPR menolak Anggaran Belanja Negara yang diajukan oleh Presiden. Kemudian, Presiden membentuk DPR Gotong Royong (DPR-GR) pada 24 Juni 1960.
Demokrasi terpimpin di Indonesia oleh Soekarno dimaksudkan sebagai demokrasiyang sesuai dengan kepribadian bangsa, yang berbeda dengan sistem demokrasi liberal produk dari barat. Demokrasi terpimpin diharapkan dapat mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil sebagai warisan demokrasi liberal. Meskipun demikian, pada pelaksanaannya demokrasi terpimpin ini mengalami penyimpangan.

1. Terjadinya Infl asi yang sangat tinggi
Negara Indonesia yang baru merdeka mengalami infl asi yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena mata uang Jepang beredar di masyarakat dalam jumlah yang tak terkendali. Saat itu Republik Indonesia belum punya uang sendiri. Pada bulan Agustus 1945 uang Jepang yang beredar di Jawa mencapai 1,6 milyar, sedangkan secara umum yang beredar di masyarakat mencapai 4 milyar.
Pemerintah Indonesia yang baru saja berdiri tidak mampu mengendalikan dan menghentikan peredaran mata uang Jepang tersebut sebab Indonesia belum memiliki mata uang sendiri sebagai penggantinya. Untuk mengatasi masalah infl asi tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk sementara waktu hanya memberlakukan 3 mata uang yang digunakan sebagai transaksi di wilayah Republik Indonesia, yaitu:
a. Mata uang De Javasche Bank
b. Mata uang pemerintah Hindia Belanda
c. Mata uang pendudukan Jepang

2. Blokade Ekonomi oleh Belanda
Belanda melakukan Blokade yaitu dengan menutup (memblokir) pintu keluar masuk perdagangan Indonesia terutama melalui jalur laut dan pelabuhan-pelabuhan penting. Blokade ini dilakukan mulai bulan November 1945. Adapun alasan dari pemerintah Belanda melakukan blokade ini adalah:
a. Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia.
b. Mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya.
c. Melindungi bangsa Indonesia dari t i n d a k a n - t i n d a k a n yang dilakukan oleh bangsa lain.

Blokade tersebut menyebabkan barang ekspor Indonesia terlambat dikirim, bahkan tidak dapat diekspor sama sekali. Kondisi tersebut menyebabkan barang eksporIndonesia yang dibumihanguskan. Karena blokade tersebut barang impor yang dibutuhkan tidak dapat masuk sehingga memperburuk kondisi ekonomi dalam negeri.

3. Mengatasi Blokade Ekonomi Belanda (NICA)
Ketika Indonesia sebagai negara muda diblokade secara ekonomi, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah dengan segala keterbatasannya melakukan upaya untuk keluar dari blockade ekonomi oleh Belanda. Ada dua

LIVEWORKSHEETS

upaya mengatasi blokade ekonomi Belanda di awal kemerdekaan, yaitu diplomasi beras ke India dan mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri. Diplomasi beras ke India pertama dipandang sebagai usaha bersifat politis.

4. Kebijakan Pemerintah Menghadapi Buruknya Kondisi Ekonomi

Sementara itu sejak Februari 1946 pemerintah di tengah keterbatasannya mengeluarkan beberapa kebijakan dalam mengatasi kondisi ekonomi yang buruk.

Pada bulan Februari 1946 pemerintah menyelenggarakan Konferensi Ekonomi pertama. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, Gubernur, dan pejabat lainnya. Tujuan Konferensi ini adalah untuk memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan. Tercapai kesepakatan bahwa sistem autarki lokal sebagai kelanjutan dari sistem ekonomi perang Jepang, secara berangsur-angsur akan dihapuskan dan diganti dengan sistem desentralisasi.

Hal lain yang disepakati dalam konferensi tersebut adalah masalah pangan disepakati bahwa Badan Pengawasan Makanan Rakyat diganti dengan Badan Persediaan dan Pembagian Makanan (BPPM) yang bertujuan untuk mengatasi kesengsaraan rakyat Indonesia.

Konferensi ekonomi kedua di Solo, 6 Mei 1946 membahas masalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi, dan alokasi tenaga manusia. Wakil Presiden Mohammad Hatta mengusulkan mengenai rehabilitasi pabrik gula,dimana gula merupakan bahan ekspor penting sehingga harus dikuasai oleh negara. Untuk

merealisasikan keinginan tersebut maka pada 6 Juni 1946 dibentuk Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).

Kebijakan ekonomi lainnya adalah Rencana Kasimo (Kasimo Plan). Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Program ini berupa Rencana Produksi Tiga tahun (1948-1950) tentang usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Inti dari Kasimo Plan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi bahan pangan.

Rencana Kasimo tersebut meliputi:

a. Menanami tanah kosong (tidak terurus) di Sumatera Timur seluas 281.277 ha.
b. Melakukan intensifi kasi pertanian di Jawa dengan menanam bibit unggul.
c. Pencegahan penyembelihan hewan yang berperan penting dalam produksi pangan.
d. Membentuk kebun-kebun bibit di desa.
e. Transmigrasi bagi 20 juta penduduk Pulau Jawa dipindahkan ke Sumatera dalam jangka waktu 10-15 tahun.

EVALUASI

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan cara mengetik huruf a, b, c, d, atau e untuk jawaban yang tepat dan benar pada kolom yang telah disediakan !

1. Penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara pada sidang tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan oleh ....
   a. BPUPKI
   b. PPKI
   c. MPRS
   d. Komite Nasional Indonesia
   e. Soekarno-Hatta

2. Golongan pemuda tidak percaya dengan BPUPKI dan PPKI, karena ...
   a. merupakan bentukan Belanda sehingga dikhawatirkan menjadi antek Belanda.
   b. merupakan bentukan Jepang sehingga dikhawatirkan menjadi antek Jepang.
   c. merupakan bentukan Sekutu sehingga dikhawatirkan menjadi antek Sekutu.
   d. Pemuda memiliki wakil dalam kedua lembaga itu tapi tidak bersuara.
   e. pemuda tidak ada yang duduk dalam kedua lembaga itu.

3. Pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI menetapkan tiga keputusan, salah satu keputusan yaitu usulan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal di Republik Indonesia akhirnya tidak jadi diberlakukan karena adanya penolakan. Akhirnyapemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah Nomor 3 pada 30 Oktober 1945.

Isi maklumat itu antara lain....
a. Pemerintah membentuk partai politik agar sebagai jalan menuju kekuasaan.
b. Pemerintah menghendaki sistem multipartai agar demokrasi tetap berjalan.
c. Pemerintah membentuk partai untuk membentuk koalisi.
d. Pemerintah menghendaki adanya partai-partai politik, karena akan membuka jalan bagi semua aliran atau paham yang ada dalam masyarakat.
e. Pemerintah membentuk banyak partai-partai politik, karena akan membuka jalan bagi semua ideologi yang ada dalam masyarakat.

4. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensiil, namun dalam perkembangannya sistem pemerintahan bergeser padasistem parlementer. Sistem parlementer ditandai dengan terbentuknya cabinet dibawah pimpinan Perdana Menteri: ..
a. Sutan Syahrir, dilanjutkan Amir Syarifuddin, dan terakhir Hatta.
b. Sutan Syahrir, dilanjutkan Mohamad Natsir, dan terakhir Hatta.
c. Sutan Syahrir, dilanjutkan Wilopo, dan terakhir Hatta.
d. Sutan Syahrir, dilanjutkan Sukiman, dan terakhir Hatta.
e. Sutan Syahrir, dilanjutkan Ki Hajar Dewantara, dan terakhir Hatta.

5. Setelah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, pemerintahan sistem cabinet parlementer berubah menjadi kabinet presidensiil yang dipimpin langsung Prsiden Soekarno, sedangkan sistem demokrasi liberal diganti menjadi ....
a. demokrasi kerakyatan
b. demokrasi Indonesia
c. demokrasi terpimpin
d. demokrasi Pancasila
e. demokrasi dan perwakilan

6. Setelah kemerdekaan mata uang yang banyak beredar adalah mata uang pendudukan Jepang, bahkan peredaran mata uang pendudukan Jepang menjadi tidak terkendali. Sementara pemerintah Republik Indonesia belum bisa membuat mata uang sendiri. Karena itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan tiga mata uang sementara yang berlaku, yaitu ....
a. mata uang Jepang, mata uang De Javasche Bank, dan mata uang pemerintah Hindia Belanda
b. mata uang Jepang, mata uang DeJavasche Bank, dan mata uang pemerintah Belanda
c. mata uang Jepang, mata uang Sekutu (US dollar), dan mata uang pemerintah Hindia Belanda
d. mata uang Jepang, mata uang Sekutu (US dollar), dan mata uang NICA
e. mata uang Jepang, mata uang Sekutu (US dollar), dan mata uang KNIL.

7. Tujuan blokade laut Belanda secara ekonomi terhadap Indonesia adalah ....
a. agar Indonesia dapat berdikari.
b. tidak berhubungan dengan dunia luar.
c. agar Indonesia lumpuh.
d. agar Indonesia tidak bisa import.
e. agar ekonomi Indonesia mengalami kekacauan.

8. Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang pertama kali ditetapkan pada tahun ....
a. 1946
b. 1947
c. 1948
d. 1949
e. 1950

9. Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, kondisi ekonomi Indonesia masih sangat buruk. Bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan seperti yang telah ditetapkan dalam Konperensi Meja Bundar. Hal tersebut di antaranya karena...
a. Indonesia hanya mengandalkan berbagai jenis ekspor namun tidak bisa eksporkarena blokade laut Belanda, sehingga memukul perekonomian Indonesia.

b. Indonesia hanya mengandalkan ekspor pertanian perkebunan dan tambang tapi tidak ada armada laut yang memadai.
c. Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor terutama hasil bumi yaitu pertanian dan perkebunan sehingga apabila permintaan ekspor dari sektor itu berkurang akan memukul perekonomian Indonesia.
d. Indonesia belum mampu melakukan ekspor karena tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai.
e. Indonesia belum mampu melakukan impor karena tidak memiliki modal yang memadai.

10. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi blokade ekonomi Belanda di antaranya ....
a. diplomasi Beras ke Mesir
b. diplomasi Beras ke Pakistan
c. diplomasi Beras ke Jepang
d. diplomasi Beras ke Burma
e. diplomasi Beras ke India

LIVEWORKSHEETS